



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WINDA RAHMALIA
2. Jabatan : KOORDINATOR PROGRAM STUDI KIMIA
3. NHK : 1002576

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 297.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, BAJAJ PULSAR 135 LS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, PROTON SAGA 1,3L FLX Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOBIL, CITROEN C3 AIRCROSS 1,2 TURBO (AX) A/T Tahun 2024, HADIAH Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.104.453

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 661.104.453

III. HUTANG Rp. 36.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 625.104.453

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.